



Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke Dalam Mendukung Pertumbuhan Umkm (Studi Kasus Sektor Kuliner Lokal Dan Kerajinan Lokal)

Febrianti Maturbongs¹⁾ Marthen Adrian Izak Nahumury¹⁾ Sebestina Siman¹⁾

Universitas Musamus

email: yantimaturbongs695@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan umkm pada sektor kuliner dan kerajinan lokal di kabupaten merauke.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini berfokus pada Peran Pemerintah Daerah dalam pertumbuhan umkm pada sektor kuliner dan kerajinan lokal di kabupaten merauke dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dan telaah dokumentasi serta menggunakan teknik analisis data interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengembangan pertumbuhan umkm pada sektor kuliner dan kerajinan lokal di kabupaten merauke, dinas perindagkop umk kabupaten merauke telah melaksanakan perannya dengan baik. Peran yang ditunjukkan oleh dinas perindagkop umk kabupaten merauke merupakan upaya untuk mengembangkan pertumbuhan umkm yang ada di kabupaten merauke melalui berbagai kegiatan agar umkm dapat semakin maju, berkembang dan memiliki daya saing yang tinggi.

Kata Kunci: Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Peran Pemerintah

ABSTRACT

This study aims to identify the role of local governments in the growth of MSMEs in the local culinary and handicraft sectors in Merauke Regency.

The research method used is a qualitative descriptive research approach. This research focuses on the Role of Local Governments in the growth of MSMEs in the local culinary and handicraft sectors in Merauke Regency by using data collection techniques through observation, in-depth interviews, documentation analysis, and interactive data analysis techniques, which include data reduction, data presentation and conclusion drawn. The study results show that in the development of MSME growth in the local culinary and handicraft sector in Merauke Regency, the Merauke Regency MSE Administrative Office has performed well. The role shown by the Merauke Regency MSE Administrative Office is an effort to develop the growth of MSMEs in the Merauke Regency through various activities so that MSMEs can be more advanced, developed, and highly competitive.

Keywords: Micro, Small and Medium Enterprises, The role of the Government

✉ Alamat korespondensi: Ekonomi
Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan
Bisnis, Universitas Musamus
Jl.Kamizaun, Mopah Lama, Merauke
99600 Indonesia
Email: ¹⁾ Tanty.tc@gmail.com

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), UMKM menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia. Dengan kontribusi yang signifikan ini, UMKM menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan ketahanan sosial masyarakat (Anugerah & Nuraini, 2021).

Menurut Sulastris (2022), UMKM memegang peranan penting dalam mengatasi resesi global karena berkontribusi signifikan terhadap PDB, menyerap sebagian besar tenaga kerja, menjadi pasar potensial bagi industri jasa keuangan, cepat mengidentifikasi pasar ekspor potensial, dan menyerap kredit paling banyak. Pemerintah telah melakukan kebijakan strategis seperti Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), UU Cipta Kerja beserta undang-undang turunannya, serta program Bangga Buatan Indonesia (BBI).

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dibuat berdasarkan PP Nomor 23 tahun 2020 yang diubah menjadi PP Nomor 43 tahun 2020 sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memulihkan ekonomi Indonesia. Program dukungan UMKM di antaranya yaitu: a. Pembiayaan KUR, b. Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), c. Subsidi Bunga/Margin Non-KUR, d. Penempatan Dana/Penempatan Uang Negara, e. Penjaminan Kredit UMKM, f. Pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDB KUMKM, g. Pajak Penghasilan Final (PPh) UMKM ditanggung pemerintah, h. serta Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan (BTPKLWN). Implementasi UU Cipta Kerja dirancang untuk melindungi dan memfasilitasi akses UMKM terhadap perizinan, rantai pasokan, pengembangan perusahaan, pembiayaan, dan akses pasar. Program Bangga Buatan Indonesia dilaksanakan untuk memastikan masyarakat Indonesia menikmati produk dalam negeri dan menggunakan hasil karya anak bangsa, khususnya produk UMKM lokal.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian di banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks sektor kuliner lokal, UMKM berperan penting dalam menyediakan makanan dan minuman yang mencerminkan kekayaan budaya daerah. Dengan memanfaatkan bahan baku lokal, pelaku UMKM tidak hanya menciptakan produk yang unik dan berkualitas, tetapi juga mendukung pertanian lokal dan perekonomian masyarakat sekitar. Sektor kuliner ini sering kali menjadi daya tarik wisata, yang membantu meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja.

Di sisi lain, sektor kuliner dan kerajinan lokal juga memiliki kontribusi signifikan terhadap pengembangan UMKM. Kerajinan tangan yang dihasilkan sering kali mencerminkan tradisi dan kearifan lokal, sehingga memiliki nilai seni dan budaya yang tinggi. Produk-produk kuliner dan kerajinan ini, seperti sagu yang diolah menjadi berbagai jenis aneka makanan, anyaman, batik, dan perhiasan, tidak hanya dipasarkan di dalam negeri, tetapi juga memiliki potensi untuk diekspor. Dengan demikian, sektor kuliner dan kerajinan tidak hanya membantu melestarikan budaya, tetapi juga meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global.

Namun, UMKM di sektor kuliner dan kerajinan lokal menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses ke modal, pemasaran, dan teknologi. Banyak pelaku UMKM yang masih menggunakan metode tradisional dalam produksi dan pemasaran, yang dapat menghambat pertumbuhan mereka. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait sangat penting untuk memberikan pelatihan, akses ke pembiayaan, serta memfasilitasi pemasaran produk. Dengan langkah-langkah yang tepat, UMKM di sektor kuliner dan kerajinan lokal dapat berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.

Pemerintah telah menjadikan pemberdayaan masyarakat sebagai prioritas utama, terutama mengingat kegagalan historis konsep pembangunan. Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk memungkinkan mereka yang tidak dapat berhasil karena hambatan internal dan eksternal. Diyakini bahwa pemberdayaan akan memiliki kekuatan untuk meningkatkan cara hidup masyarakat. Setiap daerah menerapkan pemberdayaan untuk meningkatkan standar masyarakat atau sumber daya manusia. Meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas masyarakat untuk bertahan di era globalisasi yang menghasilkan penemuan baru setiap tahunnya merupakan tujuan pemberdayaan masyarakat secara umum. Meningkatkan daya cipta komunitas kecil yang dapat menopang aktivitas ekonomi adalah salah satu cara untuk memberdayakan mereka. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kualitas masyarakat dengan memberikan pemberdayaan yang diperlukan (Mustafa, 2022).

Kabupaten Merauke, sebagai bagian dari Provinsi Papua Selatan yang baru dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022, memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama di sektor kuliner dan kerajinan. Dengan kekayaan budaya dan sumber daya lokal yang melimpah, sektor ini berpotensi menjadi penggerak utama ekonomi daerah. Namun, meskipun sektor UMKM di Merauke memiliki potensi besar, masih terdapat berbagai kendala yang menghambat pertumbuhan dan pengembangannya. Beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM di daerah ini meliputi keterbatasan akses pasar, pendanaan, dukungan

teknis, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelola usaha secara profesional.

Miftahul Azizah, pada dialog interaktif di RRI Merauke mengungkapkan bahwa jumlah UMKM di seluruh wilayah Kabupaten Merauke pada tahun 2022 berjumlah 3.315 UMKM, tersebar di seluruh Distrik di wilayah Kabupaten Merauke yang terdiri dari UMKM Mikro sebanyak 2.526, UMKM Kecil 694, dan UMKM Menengah sebanyak 95. Dari total keseluruhan UMKM yang ada, jumlah UMKM OAP masih cukup minim yakni sebanyak 498 atau sekitar 15 persen, sementara 2.817 unit (85%) lainnya dimiliki oleh non-Papua, sehingga Disperindagkop Merauke akan terus mendorong UMKM khusus asli Papua.

Merauke, yang terletak di ujung timur Indonesia, merupakan salah satu daerah yang kaya akan potensi UMKM, terutama di sektor kuliner dan kerajinan lokal. Dengan keberagaman budaya dan sumber daya alam yang melimpah, Merauke memiliki banyak produk kuliner yang unik, seperti ikan bakar, sagu, dan berbagai olahan makanan tradisional lainnya. UMKM di sektor kuliner ini tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, tetapi juga menarik perhatian wisatawan yang ingin mencicipi cita rasa khas daerah tersebut. Hal ini memberikan peluang bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha mereka dan meningkatkan pendapatan. Sektor kerajinan lokal di Merauke juga memiliki potensi yang besar. Banyak pengrajin yang menghasilkan produk-produk unik, seperti anyaman dari daun sagu, ukiran kayu, dan kerajinan tangan lainnya yang mencerminkan budaya masyarakat setempat. Kerajinan ini tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga mengandung makna budaya yang dalam. Dengan mempromosikan produk kerajinan lokal, pelaku UMKM dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan budaya dan tradisi, sekaligus menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan.

Namun, meskipun memiliki potensi yang besar, UMKM di Merauke masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan akses terhadap modal dan pembiayaan. Banyak pelaku UMKM yang kesulitan untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan, sehingga menghambat kemampuan mereka untuk mengembangkan usaha. Selain itu, kurangnya pelatihan dan pengetahuan tentang manajemen usaha dan pemasaran juga menjadi kendala yang signifikan bagi pertumbuhan UMKM di daerah ini.

Miftahul Azizah menegaskan pihaknya akan terus berkomitmen untuk berupaya meningkatkan kualitas serta kemampuan para UMKM khusus asli Papua agar dapat berkembang dan mampu bersaing di jaman digital saat ini

Dalam rangka mendukung pertumbuhan UMKM, pemerintah pusat maupun daerah telah menginisiasi berbagai kebijakan, seperti Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, serta Program Bangga Buatan Indonesia (BBI). Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk memberikan akses permodalan, pelatihan keterampilan, serta penguatan daya saing UMKM di pasar global. Namun, efektivitas program-program ini dalam konteks lokal, terutama bagi UMKM di Merauke, masih perlu dikaji lebih lanjut untuk memastikan kebijakan yang diterapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah. Pemerintah seharusnya dapat lebih fokus pada perluasan dan pengembangan sektor usaha karena UMKM memiliki hak yang krusial dalam proses pembangunan ekonomi daerah (Nurhalita, 2022).

Tantangan masa depan bagi UMKM yang harus ditangani oleh para pemangku kepentingan meliputi inovasi dan teknologi, literasi digital, produktivitas, legalitas atau perizinan, pembiayaan, branding dan pemasaran, sumber daya manusia, standardisasi dan sertifikasi, pemerataan pembinaan, pelatihan, dan fasilitasi, serta satu basis data. Terkait dengan tantangan tersebut, rendahnya kemampuan sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi metode perdagangan dari metode bisnis tradisional (offline) ke bisnis online, sehingga para pelaku UMKM harus mempelajari dan memahami teknologi untuk mendukung kegiatan usahanya. Sedangkan permasalahan mengenai legalitas usaha mulai dari Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hingga Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), mengenai pembiayaan pemerintah, hal tersebut diatasi dengan kredit usaha rakyat dengan bunga yang lebih rendah (Godwin, 2024).

Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Merauke memegang peranan penting dalam mendorong berdirinya UMKM, khususnya di bidang kuliner dan kerajinan. UMKM diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik berkat berbagai kebijakan dan inisiatif yang telah dijalankan, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian daerah. Kabupaten Merauke yang terletak di ujung timur Indonesia ini kaya akan budaya dan sumber daya adat, termasuk sektor kuliner dan kerajinan yang berkembang pesat. Meskipun sektor ini berpotensi untuk mendongkrak perekonomian daerah secara signifikan, banyak pelaku UMKM di Merauke masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk keterbatasan akses pasar, pendanaan, dan dukungan teknis.

Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah menjadi krusial dalam mendukung pertumbuhan UMKM melalui penerapan kebijakan dan program yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang "Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Pertumbuhan UMKM di Sektor Kuliner dan Kerajinan Lokal di Kabupaten Merauke".

METODE

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Merauke. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dan data yang digunakan yaitu data Primer dan data Sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Badan dan Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan Kabupaten Merauke (Sugiyono, 2016).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk mengumpulkan data. Adapun tehnik pengumpulan data tersebut :

- a. Wawancara, merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Tujuan dari wawancara adalah untuk memperoleh informasi yang tidak dapat diamati atau tidak dapat diperoleh dengan alat lain.
- b. Observasi, hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang

diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.

- c. Dokumentasi, Informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Merauke terletak di bagian paling timur dan selatan wilayah Republik Indonesia, tepatnya di Provinsi Papua Selatan. Secara astronomis, wilayah ini berada antara 137° - 141° Bujur Timur dan 5° - 9° Lintang Selatan. Dengan luas wilayah yang cukup besar, Kabupaten Merauke memiliki karakteristik geografis yang unik.

Secara administratif, Kabupaten Merauke terdiri dari 22 distrik (kecamatan), di antaranya Kimaam, Ilwayab, Okaba, Kurik, Malind, Semangga, Sota, Muting, Jagebob, dan Merauke sebagai ibu kota kabupaten. Setiap distrik memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda, yang dapat menjadi fokus penelitian di berbagai bidang.

Secara keseluruhan, Kabupaten Merauke memiliki potensi yang sangat besar dalam berbagai aspek, mulai dari sumber daya alam, keanekaragaman hayati, hingga budaya. Namun, tantangan dalam pengelolaan sumber daya dan pembangunan infrastruktur harus dihadapi dengan bijak agar masyarakat dapat menikmati manfaat dari kekayaan yang dimiliki daerah ini.

Berdasarkan data yang di dapatkan dari kantor BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Merauke tentang jumlah penduduk, baik Orang Asli Papua (OAP) maupun masyarakat pendatang di Kabupaten Merauke dalam kurung waktu 6 tahun terakhir yakni 2019 sampai dengan 2024 sebagai berikut:

Tabel 4.1. Jumlah penduduk di Kabupaten Merauke

| Kecamatan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| KIMAAM | 6.697 | 6.024 | 6.044 | 3.889 | 5.442 | 5.697 |
| WAAN | 5.146 | 3.413 | 3.424 | 2.161 | 2.205 | 2.461 |
| TABONJI | 5.924 | 3.838 | 3.851 | 3.844 | 3.088 | 3.167 |
| ILWAYAB | 5.913 | 3.856 | 3.869 | 3.863 | 2.542 | 2.679 |
| OKABA | 5.610 | 4.132 | 4.146 | 4.144 | 4.171 | 4.644 |
| TUBANG | 2.582 | 2.679 | 2.688 | 2.696 | 2.597 | 2.611 |
| NGGUTI | 2.154 | 3.618 | 3.630 | 3.627 | 2.511 | 2.626 |
| KAPTEL | 2.005 | 1.796 | 1.802 | 1.800 | 1.535 | 1.565 |
| KURIK | 15.125 | 16.235 | 16.289 | 16.336 | 16.853 | 17.223 |
| MALIND | 10.136 | 10.503 | 10.538 | 10.542 | 10.784 | 11.007 |
| ANIMHA | 2.246 | 2.317 | 2.325 | 2.331 | 2.356 | 2.426 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| MERAUKE | 101.78 4 | 102.35 1 | 102.68 9 | 102.48 6 | 110.54 1 | 116.864 |
| SEMANGGA | 14.698 | 15.811 | 15.863 | 15.909 | 16.818 | 17.190 |
| TANAH MIRING | 19.283 | 19.968 | 20.034 | 20.028 | 21.440 | 22.164 |
| JAGEBOB | 7.925 | 8.001 | 8.027 | 8.020 | 8.269 | 8.497 |
| SOTA | 3.337 | 3.461 | 3.472 | 3.480 | 3.614 | 3.717 |
| NAUKENJERA I | 2.152 | 2.500 | 2.508 | 2.528 | 2.598 | 2.600 |
| MUTING | 5.801 | 6.068 | 6.088 | 6.093 | 6.883 | 7.286 |
| ELIGOBEL | 4.289 | 5.106 | 5.123 | 5.130 | 5.740 | 6.132 |
| ULILIN | 4.604 | 9.255 | 9.286 | 9.286 | 10.196 | 10.791 |
| KONTUAR | - | - | - | 1.257 | 1.174 | 1.236 |
| PADUA | - | - | - | 2.907 | 2.365 | 2.585 |
| KAB.MERAUK E | 227.41 1 | 230.93 2 | 231.69 6 | 232.35 7 | 243.72 2 | 255.168 |

Sumber: diolah oleh BPS tahun 2025

a. Gambaran Umum UMKM di Kabupaten Merauke

Kondisi UMKM di Kabupaten Merauke menunjukkan beberapa dinamika yang menarik, terutama ketika mempertimbangkan ekspansi ekonomi lokal. Di daerah ini, UMKM sangat penting untuk penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan pendapatan masyarakat. Namun, masih ada kebutuhan untuk lebih memfokuskan perhatian pada kesulitan yang dihadapi perusahaan UMKM, seperti pemasaran dan ketersediaan pembiayaan.

Dua sektor yang paling penting untuk pertumbuhan UMKM di Merauke adalah industri kuliner dan kerajinan lokal. Banyak pemilik usaha memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk memproduksi barang-barang yang unik dan menarik. Melalui berbagai inisiatif, termasuk festival dan pameran, pemerintah setempat juga berupaya mempromosikan barang-barang ini, meningkatkan daya tarik dan visibilitasnya.

Secara keseluruhan, masih ada banyak masalah yang perlu dipecahkan meskipun UMKM di Kabupaten Merauke memiliki banyak potensi untuk meningkatkan ekonomi lokal. Diharapkan bahwa UMKM dapat meningkatkan perkembangan mereka dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Merauke dengan bantuan yang tepat dari pemerintah dan masyarakat

Berdasarkan data yang di dapatkan dari kantor BPS Kabupaten Merauke dan Dinas Perindagkop UMK tentang jumlah UMKM, baik OAP maupun masyarakat pendatang di Kabupaten Merauke dalam kurung waktu 4 tahun terakhir yakni 2021 sampai dengan 2024 sebagai berikut:

Tabel 4.2. Jumlah UMKM di Kabupaten Merauke

| Tahun | Jumlah |
|--------------|---------------|
| 2021 | 2.433 |
| 2022 | 2.622 |
| 2023 | 3.600 |

2024 6.717

Sumber: diolah oleh BPS tahun 2025

Pada tabel tersebut menggambarkan adanya tren peningkatan jumlah dari tahun 2021 hingga 2024. Pada awalnya, dari tahun 2021 ke 2022, terjadi peningkatan yang relatif kecil, yaitu sebanyak 189. Namun, peningkatan yang lebih signifikan mulai terlihat pada periode 2022 ke 2023 dengan kenaikan sebesar 978. Lonjakan terbesar terjadi antara tahun 2023 dan 2024, di mana jumlah meningkat secara dramatis sebesar 3.117. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terjadi akselerasi pertumbuhan jumlah dari tahun ke tahun, dengan peningkatan paling tajam terjadi pada tahun terakhir yang tercatat.

Tabel 4.3. Jumlah UMKM berdasarkan klasifikasi di Kabupaten Merauke

| Tahun Pendataan | Klasifikasi Jenis Usaha | | | Kapasitas |
|-----------------|-------------------------|-------------|----------------|-----------|
| | Usaha Mikro | Usaha Kecil | Usaha Menengah | |
| 2019 | 120 | 472 | 65 | 657 |
| 2020 | 336 | 110 | 4 | 450 |
| 2021 | 244 | 70 | 2 | 316 |
| 2022 | 516 | 126 | 6 | 648 |
| 2023 | 384 | 4 | 0 | 388 |
| Total | 1600 | 782 | 77 | 2459 |

Sumber: diolah oleh dinas perindagkop umk tahun 2025

Tabel tersebut menyajikan data pendataan usaha berdasarkan klasifikasi jenis usaha (Mikro, Kecil, Menengah) dari tahun 2019 hingga 2023, beserta total usaha untuk setiap tahun dan total keseluruhan selama periode tersebut.

Secara keseluruhan, selama periode 2019-2023, usaha mikro mendominasi jumlah usaha dengan total 1600, diikuti usaha kecil sebanyak 782 dan usaha menengah sebanyak 77. Terlihat adanya fluktuasi jumlah usaha dari tahun ke tahun di semua klasifikasi, namun usaha mikro memberikan kontribusi terbesar terhadap total keseluruhan usaha. Penurunan paling signifikan terjadi pada tahun 2020 dan 2021, diikuti dengan pemulihan pada tahun 2022, namun kembali menurun pada tahun 2023 terutama pada sektor usaha kecil dan menengah. Berikut data jumlah pelaku usaha pada sektor kuliner dan kerajinan di kabupaten merauke 5 tahun terakhir yakni 2019 sampai dengan 2023 sebagai berikut:

A. Deskripsi Data

1. Deskripsi data

Karakteristik dan Pengalaman Awal Usaha Berdasarkan Skala

1. Usaha Mikro

Wawancara mengungkapkan bahwa usaha mikro seringkali dimulai dengan modal sangat terbatas, bahkan dari tabungan pribadi atau pinjaman kecil dari keluarga. Motivasi utamanya adalah memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. Pelaku usaha umumnya memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, namun pengetahuan bisnis formal sangat minim. Mereka cenderung beroperasi di lingkungan sekitar tempat tinggal atau pasar tradisional.

2. Usaha Kecil

Pelaku usaha kecil menunjukkan adanya peningkatan modal awal, seringkali berasal dari pengembangan usaha mikro sebelumnya atau pinjaman skala menengah. Motivasi tidak hanya sekadar bertahan hidup, tetapi juga mulai melihat potensi pertumbuhan dan peningkatan pendapatan. Tingkat pendidikan dan pengalaman kerja pemilik usaha kecil cenderung sedikit lebih tinggi dibandingkan usaha mikro. Mereka mulai memiliki tempat usaha yang lebih permanen dan jangkauan pasar yang lebih luas.

3. Usaha Menengah

Usaha menengah umumnya didirikan dengan perencanaan yang lebih matang dan modal yang lebih besar, seringkali melibatkan investor atau pinjaman bank dengan agunan yang jelas. Motivasi utamanya adalah ekspansi pasar, peningkatan keuntungan, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih signifikan. Pemilik usaha menengah biasanya memiliki latar belakang pendidikan yang lebih tinggi atau pengalaman manajerial. Struktur organisasi usaha mulai terlihat dan pemisahan antara pemilik dan operasional harian mulai ada.

Tantangan Utama yang Dihadapi Berdasarkan Skala Usaha

1. Usaha Mikro: Tantangan paling signifikan yang diungkapkan adalah akses permodalan yang sangat terbatas dan tidak formal. Mereka kesulitan mendapatkan pinjaman dan seringkali terjerat pinjaman dengan bunga tinggi. Selain itu, kurangnya pengetahuan manajemen dasar, pemasaran, dan pembukuan menjadi hambatan besar. Persaingan dengan pedagang lain di pasar tradisional juga sangat ketat.
2. Usaha Kecil: Pelaku usaha kecil menghadapi tantangan akses permodalan yang lebih baik dibandingkan mikro, namun masih terkendala persyaratan dan suku bunga. Mereka juga merasakan persaingan dengan usaha yang lebih besar dan produk dari luar daerah. Pengelolaan keuangan yang lebih kompleks menjadi tantangan baru seiring dengan pertumbuhan usaha. Beberapa juga kesulitan dalam mendapatkan tenaga kerja yang terampil.
3. Usaha Menengah: Tantangan utama bagi usaha menengah adalah skalabilitas usaha dan persaingan dengan pemain yang lebih besar di tingkat regional atau nasional. Mereka juga menghadapi kompleksitas manajemen yang lebih tinggi, termasuk pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan operasional. Akses ke pasar yang lebih luas dan rantai pasok yang efisien menjadi krusial. Beberapa juga menyoroti regulasi dan birokrasi yang terkadang menghambat pengembangan usaha.

Strategi Adaptasi dan Inovasi Berdasarkan Skala Usaha

1. Usaha Mikro: Strategi adaptasi yang umum adalah menjaga hubungan baik dengan pelanggan, menawarkan harga yang bersaing, dan berinovasi pada produk secara sederhana (misalnya, variasi rasa atau tampilan). Beberapa mulai mencoba memanfaatkan media sosial sederhana untuk promosi lokal.
2. Usaha Kecil: Pelaku usaha kecil mulai menunjukkan upaya diversifikasi produk atau layanan yang lebih terencana. Beberapa mulai memanfaatkan platform online untuk pemasaran dan penjualan, meskipun masih terbatas. Mereka juga berupaya meningkatkan kualitas produk dan layanan untuk memenangkan persaingan.

3. Usaha Menengah: Strategi adaptasi dan inovasi pada usaha menengah lebih terstruktur, termasuk pengembangan produk baru, peningkatan efisiensi operasional, dan perluasan jaringan pemasaran. Mereka juga lebih aktif dalam mencari informasi tentang peluang pasar dan teknologi baru. Beberapa mulai berkolaborasi dengan usaha lain atau mengikuti pameran untuk memperluas jangkauan.

Persepsi tentang Dukungan Eksternal Berdasarkan Skala Usaha

1. Usaha Mikro: Sebagian besar pelaku usaha mikro merasa kurang tersentuh oleh program dukungan pemerintah. Informasi tentang program seringkali tidak sampai kepada mereka, atau persyaratannya dianggap tidak realistis. Mereka lebih mengandalkan dukungan dari keluarga dan komunitas sekitar.
2. Usaha Kecil: Pelaku usaha kecil memiliki pengalaman yang beragam terkait dukungan eksternal. Beberapa pernah mencoba mengakses program KUR atau pelatihan, namun seringkali merasa prosesnya rumit dan manfaatnya tidak signifikan. Mereka berharap adanya pendampingan yang lebih intensif dan akses permodalan yang lebih mudah.
3. Usaha Menengah: Pelaku usaha menengah umumnya memiliki akses yang lebih baik ke informasi dan program dukungan, namun mereka seringkali mengharapkan dukungan yang lebih spesifik sesuai dengan skala usaha mereka, seperti fasilitasi akses pasar yang lebih luas, insentif ekspor, atau kemudahan perizinan investasi. Beberapa juga menyoroti perlunya koordinasi yang lebih baik antar instansi pemerintah.

B. Pembahasan

Penelitian mengenai peran pemerintah daerah Kabupaten Merauke dalam mendukung pertumbuhan UMKM, khususnya di sektor kuliner lokal dan 61 kerajinan lokal, menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran yang signifikan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Melalui berbagai program dan kebijakan, pemerintah daerah berupaya memberikan dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing UMKM di wilayah tersebut.

1. Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendukung UMKM

Melalui sejumlah proyek dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat, Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke memainkan peran signifikan dalam mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah tulang punggung pengembangan ekonomi lokal, dan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung ekspansinya. UMKM lebih dari sekadar perusahaan individu; mereka adalah fondasi ekonomi lokal yang dapat meningkatkan inovasi lokal, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, dukungan sistematis dan berkelanjutan dari pemerintah daerah menjadi pilar krusial bagi pengembangan dan daya saing UMKM.

Pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk mengembangkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) UMKM. Pelaku UMKM dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam berbagai bidang bisnis, termasuk manajemen keuangan, pemasaran, produksi, dan penggunaan teknologi, melalui

lokakarya, pelatihan, dan dukungan. Bagi UMKM, ide-ide inovatif dan produk serta layanan berkualitas tinggi akan didorong oleh sumber daya manusia yang terampil. Membuka pasar untuk barang dan layanan UMKM adalah fungsi penting lainnya dari pemerintah daerah. Pameran dan bazaar lokal, regional, dan nasional dapat diadakan untuk mencapai tujuan ini. Pemerintah daerah juga dapat membantu UMKM dalam menggunakan e-commerce dan platform digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Komponen penting lainnya dari upaya ini adalah promosi barang-barang regional melalui berbagai platform.

Selain itu, pemerintah daerah harus memiliki sistem yang efisien untuk menangani keluhan dan menindaklanjuti tujuan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Menemukan solusi yang tepat dan mengidentifikasi masalah yang ada akan lebih mudah dengan adanya percakapan positif antara UMKM dan pemerintah.

Salah satu persyaratan kunci untuk menjalankan UMKM secara efisien adalah infrastruktur yang memadai. Infrastruktur yang dapat digunakan oleh UMKM, seperti jalan, listrik, air bersih, dan koneksi internet, harus disediakan dan dipelihara oleh pemerintah daerah. Ketersediaan infrastruktur berkualitas akan meningkatkan efisiensi UMKM dan menurunkan biaya operasional.

Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Merauke memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui berbagai inisiatif dan program, pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pelaku UMKM, tetapi juga membuka akses pasar, menyediakan infrastruktur yang memadai, dan menciptakan mekanisme komunikasi yang efektif antara pemerintah dan pelaku UMKM. Dukungan yang terstruktur dan berkelanjutan dari pemerintah daerah menjadi fondasi penting bagi kemajuan dan daya saing UMKM, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

2. Faktor-Faktor Yang Dihadapi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

Berbagai faktor, terutama dalam industri kerajinan tangan dan kuliner regional, berdampak pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Merauke.

Faktor pertama yang adalah ketersediaan dana dan pendanaan. Karena jaminan yang tidak memadai atau kurangnya pengetahuan tentang manajemen keuangan, banyak pelaku UMKM di Merauke kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Dukungan harus ditingkatkan oleh pemerintah dan lembaga keuangan melalui program kredit yang lebih mudah diakses dan pendidikan manajemen keuangan bagi pelaku usaha.

Faktor kedua adalah pengembangan UMKM juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan kecerdasan komersial. Inovasi dalam rasa dan penampilan adalah komponen penting dalam menarik klien di industri makanan lokal. Sementara itu, kemampuan untuk memproduksi barang-barang yang khas dan berkualitas tinggi adalah faktor utama penentu daya saing di industri kerajinan. Sayangnya, para pengusaha sering kali sulit untuk mewujudkan potensi penuh mereka karena kurangnya pelatihan dan pendidikan kewirausahaan. Mereka dapat meningkatkan

kemampuan mereka melalui kerjasama dengan institusi pendidikan dan program pelatihan berkelanjutan.

Faktor ketiga adalah dukungan untuk undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. UMKM mungkin mengalami kesulitan untuk berkembang karena aturan yang rumit atau perizinan yang menantang, terutama bagi pemilik bisnis yang baru pertama kali. Namun, ekspansi UMKM dapat diuntungkan dari kebijakan yang menguntungkan seperti pengurangan pajak, bantuan hibah, dan promosi barang daerah di pameran atau pameran dagang. Dengan memberlakukan undang-undang yang mendukung UMKM, pemerintah daerah dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pengembangan lingkungan bisnis yang menguntungkan.

Ada sejumlah elemen internal dan eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kualitas produk adalah aspek internal yang sangat penting. Produksi produk berkualitas tinggi memberikan UMKM kesempatan yang lebih baik untuk menarik klien dan mempertahankan yang sudah ada. Misalnya, rasa, kebersihan, dan presentasi makanan adalah faktor penentu daya saing perusahaan di industri kuliner. Sebaliknya, kualitas di industri kerajinan ditentukan oleh daya tahan produk, pilihan material, dan elemen seni pengrajin. Agar UMKM dapat membangun reputasi positif di pasar, mereka harus secara konsisten mempertahankan standar kualitas.

Selain kualitas produk, inovasi adalah pendorong internal utama bagi pertumbuhan UMKM. Ini bisa berarti menciptakan produk baru, meningkatkan efisiensi produksi, atau menerapkan strategi pemasaran yang lebih baik. UMKM yang terus berinovasi cenderung lebih mampu bertahan dalam persaingan ketat.

Di sisi lain, ketersediaan bahan baku adalah faktor eksternal yang sangat memengaruhi UMKM. Ketergantungan pada bahan baku tertentu yang pasokannya tidak stabil atau harganya berfluktuasi dapat menghambat produksi dan meningkatkan biaya operasional. Contohnya, di sektor kuliner, kenaikan harga daging, sayur, atau ikan dapat memengaruhi harga jual dan keuntungan. Di sektor kerajinan, ketersediaan rotan atau kayu sangat menentukan produksi dan kualitas produk akhir.

Terakhir, regulasi dan kebijakan pemerintah juga merupakan faktor eksternal yang dapat mendukung atau menghambat pertumbuhan UMKM. Kebijakan yang mempermudah perizinan, memberikan insentif pajak, atau menyediakan bantuan modal akan membantu UMKM berkembang lebih cepat.

3. Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Pertumbuhan UMKM Sektor Kuliner Dan Kerajinan Di Merauke

- a) Kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah daerah yang ditujukan untuk mendukung UMKM.

Pemerintah daerah di Kabupaten Merauke memiliki berbagai kebijakan, program, dan kegiatan untuk mendukung UMKM, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Alokasi bantuan dana dan modal

Pemerintah Daerah (Pemda) Merauke mengalokasikan Rp 2,2 miliar melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Perindagkop UKM) Kabupaten Merauke untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bantuan ini tidak diberikan secara merata, melainkan dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh para pelaku UMKM. Setelah dana disalurkan, Pemda Merauke akan melakukan pengawasan ketat terhadap perkembangan usaha. UMKM yang tidak

memanfaatkan dana bantuan dengan baik akan dimasukkan ke dalam daftar hitam. Selain bantuan dana tersebut, Dinas Perindagkop UKM juga memberikan modal usaha kepada kelompok usaha yang bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus). Untuk membantu UMKM memperluas pasar, dinas ini juga aktif mempromosikan produk mereka dalam berbagai kegiatan.

2) Pelatihan dan peningkatan wawasan

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Merauke secara aktif meningkatkan wawasan pelaku UMKM asli Papua di Kabupaten Merauke. Mereka menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan yang berfokus pada peningkatan pengetahuan untuk menghasilkan produk berkualitas dan mencari peluang pasar. Sekitar 45 peserta telah mengikuti pelatihan ini dengan tujuan utama menghasilkan pendapatan yang dapat menunjang kebutuhan ekonomi keluarga mereka. Pelatihan ini adalah bagian dari upaya pendampingan berkelanjutan oleh dinas untuk memastikan keberlanjutan aktivitas UMKM di Merauke.

Pemerintah daerah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mempromosikan produk UMKM melalui partisipasi dalam pameran dan festival, yang meningkatkan visibilitas dan penjualan produk UMKM Merauke serta membuka peluang pasar yang lebih luas.

3) Kebijakan dan Regulasi Pendukung

Pemerintah Kabupaten Merauke telah menerapkan kebijakan yang memfasilitasi pelaku UMKM, mencakup penyederhanaan perizinan, insentif pajak, serta pelatihan dan pendampingan. Tujuan dari upaya ini adalah menciptakan lingkungan usaha yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM di Merauke.

Secara keseluruhan, Pemda Merauke terus berupaya meningkatkan pemberdayaan UMKM melalui berbagai kebijakan dan program. Namun, masih ada tantangan seperti hambatan budaya dan keterbatasan sumber daya yang perlu diatasi untuk mencapai pemberdayaan UMKM yang optimal. Dalam mendukung UMKM, Pemda Merauke menerapkan pendekatan pentahelix, yang menekankan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta. Inisiatif ini bertujuan untuk mendorong inovasi, meningkatkan ketahanan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

b) Dukungan yang diberikan di sektor kuliner lokal dan kerajinan lokal.

Pemerintah Kabupaten Merauke telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mendukung sektor kuliner lokal dan kerajinan lokal, dengan fokus pada pelatihan, bantuan permodalan, promosi, dan pemberian izin usaha.

1) Program pelatihan dan pendampingan

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Merauke telah menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan pengetahuan UMKM. Pelatihan ini bertujuan agar para peserta mampu menghasilkan produk berkualitas dan menemukan peluang pasar. Sekitar 45 peserta mengikuti pelatihan dua hari tersebut pada Desember 2024. Selain pelatihan, dinas juga menjalankan program pendampingan bagi 96 kelompok UMKM yang telah menerima bantuan modal. Tenaga pendamping disiapkan untuk memberikan bimbingan dalam proses produksi dan memastikan pemanfaatan bantuan modal secara efektif.

2) Bantuan permodalan

Pemerintah daerah menyalurkan bantuan modal usaha sebesar Rp 2,2 miliar untuk tahun 2024, bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus). Besarannya bervariasi, antara Rp 10 juta hingga Rp 40 juta per kelompok usaha, disesuaikan dengan skala usaha masing-masing. Selain itu, mama-mama Papua yang bergerak di sektor kuliner juga menerima bantuan modal sebesar Rp 40 juta per penerima. Dana ini akan langsung ditransfer ke rekening mereka setelah mengikuti pelatihan di Yogyakarta dan Jakarta.

3) Promosi dan pemasaran produk

Dinas Perindagkop aktif mempromosikan produk lokal Merauke dengan membuka outlet di Bandara Mopah dan Orange Mall. Selain itu, para pelaku UMKM juga diikutsertakan dalam berbagai pameran, seperti saat HUT ke-122 Merauke dan acara Car Free Day bulanan. Program pameran selama PON XX Papua di Klaster Merauke terbukti sangat sukses, dengan mencatat transaksi harian mencapai Rp 82 juta. Total target transaksi selama acara tersebut diperkirakan mencapai Rp 1 miliar, menunjukkan dampak positif signifikan dari upaya promosi terhadap pemasaran produk UMKM.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah Kabupaten Merauke memainkan peran penting dalam mendukung perkembangan UMKM. Melalui penciptaan regulasi yang kondusif, fasilitasi akses keuangan, pengembangan SDM, perluasan akses pasar, penyediaan infrastruktur, pembangunan jaringan kemitraan, penampungan aspirasi, dan dorongan adopsi teknologi, pemerintah daerah menjadi fondasi krusial bagi pertumbuhan dan daya saing UMKM. Dukungan yang komprehensif dan berkelanjutan ini tidak hanya memberdayakan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi lokal, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penguatan identitas ekonomi daerah secara keseluruhan. Sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, pelaku UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam mewujudkan ekosistem UMKM yang maju dan berdaya saing.
2. Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Merauke dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama dalam sektor kuliner lokal dan kerajinan tangan. UMKM di Kabupaten Merauke dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi aspek-aspek yang berada dalam kendali pelaku usaha, seperti kualitas produk, inovasi, manajemen keuangan, dan keterampilan sumber daya manusia. Sementara itu, faktor eksternal mencakup kondisi di luar kendali pelaku usaha, seperti akses pasar, regulasi pemerintah, ketersediaan bahan baku, serta persaingan usaha. Kombinasi dari kedua faktor ini akan menentukan sejauh mana UMKM dapat berkembang dan bertahan di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah.

3. Pemerintah daerah Kabupaten Merauke telah mengeluarkan kebijakan yang memudahkan pelaku UMKM dalam menjalankan usaha mereka. Kebijakan ini meliputi penyederhanaan prosedur perizinan, pemberian insentif pajak, dan dukungan dalam bentuk pelatihan serta pendampingan. Secara keseluruhan, pemerintah daerah Kabupaten Merauke terus berupaya meningkatkan pemberdayaan UMKM melalui berbagai kebijakan dan program. Namun, tantangan seperti hambatan budaya dan keterbatasan sumber daya masih perlu diatasi untuk mencapai pemberdayaan UMKM yang optimal. Pemerintah daerah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mempromosikan produk UMKM melalui partisipasi dalam pameran dan festival, yang meningkatkan visibilitas dan penjualan produk UMKM Merauke serta membuka peluang pasar yang lebih luas.

Saran

1. Untuk mengoptimalkan peran serta dukungan pemerintah daerah terhadap UMKM di Merauke, Papua, dan wilayah lainnya, diperlukan penguatan koordinasi antar dinas, penyusunan data UMKM yang akurat dan terpusat, fokus pada pendampingan berkelanjutan, pengembangan ekosistem digital UMKM, peningkatan akses pembiayaan alternatif, promosi produk lokal yang lebih agresif, pemberdayaan kelompok UMKM berbasis potensi lokal, evaluasi dan penyesuaian kebijakan berkala, peningkatan literasi keuangan dan bisnis, serta dorongan inovasi dan adaptasi teknologi, implementasi terpadu akan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif dan memberikan dukungan yang lebih efektif bagi pertumbuhan serta keberlanjutan UMKM, yang pada akhirnya akan berdampak positif signifikan pada perekonomian daerah secara keseluruhan.
2. Faktor yang menghambat UMKM di Kabupaten Merauke salah satunya adalah modal dan pembiayaan, yang mana pemerintah dan lembaga keuangan perlu memperkuat dukungan dengan skema kredit yang lebih mudah diakses serta pelatihan manajemen keuangan bagi pelaku usaha. Perilaku konsumen dan tren pasar juga sangat menentukan pertumbuhan UMKM di Kabupaten Merauke. Dalam sektor kuliner, tren makanan sehat dan ramah lingkungan semakin diminati, sehingga pelaku usaha perlu berinovasi dalam menyajikan menu yang sesuai dengan preferensi konsumen, untuk mengatasi produk di Kabupaten Merauke yang rata-rata kurang bersaing, maka diharapkan adanya campur tangan Pemerintah dalam hal memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang inovasi produk yang lebih baik.
3. Kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Merauke telah mengeluarkan kebijakan yang memudahkan pelaku UMKM dalam menjalankan usaha mereka, Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, terdapat hambatan dalam pengembangan UMKM, terutama bagi orang asli Papua di Kabupaten Merauke. Hambatan budaya, seperti pola pikir yang belum sepenuhnya mendukung kewirausahaan, serta keterbatasan modal dan akses pasar menjadi tantangan yang perlu diatasi. Selain itu, persaingan dengan usaha-usaha masyarakat yang mengikuti perkembangan zaman juga menjadi kendala bagi pengembangan UMKM orang asli Papua.

Sehingga peran Pemerintah sangat dibutuhkan dalam mendukung perkembangan UMKM di Merauke dengan mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya pengetahuan dalam mengembangkan dan mengatasi setiap dampak yang akan timbul dalam menjalankan UMKM di Kabupaten Merauke.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Anggraeni, F. D. (2013). *Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui fasilitasi pihak eksternal dan potensi internal (Studi kasus pada kelompok usaha "Emping Jagung" di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- [2]. Arikunto, Suharsimi. "Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek." (2010).
- [3]. Arfan, N., & Hasan, H. A. (2022). Penerapan Digital Marketing Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research*, 6(2), 212-224.
- [4]. Dedi Heluka. (2023). Penyerapan tenaga kerja pada sektor usaha kecil dan menengah di distrik Sota kabupaten Merauke,. *SKRIPSI*
- [5]. Godwin, G., Junaedi, S. R. P., Hardini, M., & Purnama, S. (2024). Inovasi Bisnis Digital untuk Mendorong Pertumbuhan UMKM melalui Teknologi dan Adaptasi Digital. *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal*, 5(2), 41-47.
- [6]. Hidayati, N. (2021). "Kuliner Lokal sebagai Identitas Budaya dan Daya Tarik Wisata." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(3), 112-125. PT Permodalan Nasional Madani Semarang." *Utsaha: Journal of Entrepreneurship* (2023): 107-117.
- [7]. Hakim, Mohammad Rizal. "Communication Strategy for Mekaar Customers
- [8]. Halim, F. S. (2021). Meninjau Hubungan Antara Penggunaan Media Sosial dan Orientasi Pasar Terhadap Kinerja Bisnis Sektor UMKM. In *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Bisnis* (pp. 165-179).
- [9]. Indonesia, K. P. (2021). *Pengembangan Kuliner Lokal sebagai Daya Tarik Wisata*. . Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- [10]. Iskandar, Y. N. (2020). "Pengaruh karakteristik usaha dan wirausaha terhadap kinerja UMKM industri pengolahan perikanan di Kabupaten Sukabumi." . *Jurnal REKOMEN (Riset Ekonomi Manajemen)* 4.1 (2020): 1-12.
- [11]. Kementerian Koperasi dan UMKM (2023). *Laporan Statistik UMKM Nasional*.
- [12]. Kemenkop. (2021). *Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM). (2021). Laporan Tahunan Koperasi dan UMKM 2020*. . Jakarta: Kemenkop UKM.
- [13]. KUR Semakin Strategis Dongkrak UMKM. (2024, oktober 21). Retrieved from Indonesia.GO.ID:<https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8712/kur-semakin-strategis-dongkrak-umkm?lang=1>

- [14]. Lestari, B. S. (2024). Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)* Vol. 2, No.2, Juni2024.
- [15]. Mustafa, N. R. (2022). Pemberdayaan orang asli papua melalui umkm guna meningkatkan perekonomian di Kabupaten Merauke. Hal 2.
- [16]. Nirwana, Devi Chandra, Muhammadiyah Muhammadiyah, and Muhajirah
- [17]. Hasanuddin. "Peran pemerintah dalam pembinaan usaha kecil menengah di Kabupaten Enrekang." *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik* 3.1 (2017): 01-14.
- [18]. Nurhalita, S. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten Langkat (The Role Of Local Governments In Empowerment Of Micro Small Medium Enterprises (Msmes) In Langkat Regency). . *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Binsin*, 5. <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/Mr/index>.
- [19]. Nourmalasari, R. D. (2018). Pengembangan Ekonomi Lokal dengan Pendekatan Local Economic Resource Development untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat. *SKRIPSI*.
- [20]. Partomo, T. S. (2004). "Usaha kecil menengah dan Koperasi." Fakultas Ekonomi. Universitas Trisakti. *Jakarta* .
- [21]. Prakasa, D. Y. (2021). Surij UMKM Sintas Pandemi: Strategi Bertahan dan Bertumbuh. *Prasetya Mulya Publishing*.
- [22]. Prasetya, A. (2023). Mengenal Program Pembinaan UMKM Kemenkeu Satu Tahun 2023.
- [23]. Rachman, Adi Maulana, Okto Irianto, and Elly Noer. "Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Negosiasi Binsis UMKM di Lingkungan Provinsi Papua Selatan." *JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT AKADEMISI* 3.1 (2025): 01-05.
- [24]. Sari, R. (2021). Strategi UMKM dalam Menghadapi Persaingan Pasar. . *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*.
- [25]. Setyorini, D. S. (2020). Peningkatan Kapasitas UMKM Melalui Penyusunan Business Plan. In *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*.
- [26]. Soejoedono, T. S. (n.d.). "Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi". (*Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004*), hal. 13.
- [27]. Sudarno, S. (2011). "Kontribusi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Depok. " *Ekonomi & Bisnis* 10.2.

- [28]. Sugiono, dkk. (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-4. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- [29]. Sugiyono. (2018). Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- [30]. Sukirno, S. (2020). Peran UMKM dalam Pembangunan Ekonomi Lokal. . *Jurnal Pembangunan Ekonomi*, 12(1), 23-34.
- [31]. Sulistyastuti, D. R. (n.d.). "Dinamika usaha kecil dan menengah (ukm) analisis konsentrasi regional ukm di Indonesia 1999–2001. " *Economic Journal of Emerging Markets* 9.2 (2004).
- [32]. Sumadi, Marantika Fibrianti. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) "Handycraft" Limbah Kayu Jati Sebagai Produk Unggulan Kabupaten Bojonegoro" (Studi Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro). Diss. UPN Jawa Timur, 2021.
- [33]. Suradinata, P. E., Badilla, N. W. Y., Ardiansya, M., & Tuwing, F. A. (2023). Penyuluhan Hukum Tentang Perjanjian Sewa Menyewa Bagi Pelaku UMKM Rental Mobil Di Kota Merauke. *Jurnal Pengabdian UMKM*, 2(2), 143-151.
- [34]. Tambunan, T. (2021). UMKM dan ekonomi Daerah: peluang dan tantangan . *Depok Rajawali Press*.
- [35]. Toman Sony Tambunan, & J. (2023). Pelatihan Peningkatan Keterampilan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Samosir. . *Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti*, 4(3), 553–565. Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Statistik UMKM di Papua: Laporan Tahunan 2022*.